

Analisis CSIS

Tantangan Indonesia di Tengah Pentas Domestik dan Global

ANALISIS PERISTIWA

- *Tinjauan Perkembangan Politik:*
 - Indonesia dan Persaingan di Pentas Global
- *Tinjauan Perkembangan Ekonomi:*
 - Pertumbuhan Kuat, Tapi Resiko Meningkat
 - Menakar Anggaran Belanja Negara
- *Tinjauan Perkembangan Regional dan Global:*
 - Tantangan ASEAN dan Masalah Konflik Laut China Selatan

ARTIKEL

- *Pro-Growth, Pro-Job, dan Pro-Poor* di Era Presiden SBY: Antara Harapan dan Kenyataan
- Terbaikannya Potensi Strategis Kelompok *Transient Poor* dalam Kebijakan
- Prospek Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global
- *Indigenized Good Governance* dan Akuntabilitas Sosial di Papua
- Pelanggaran HAM Seputar Jajak Pendapat di Timor Timur dan Reformasi TNI
- Masalah Keamanan dan Penyelundupan Senjata ke Wilayah Indonesia



CENTRE FOR
STRATEGIC
AND
INTERNATIONAL
STUDIES

Analisis CSIS

Tantangan Indonesia di Tengah Pentas Domestik dan Global

ANALISIS PERISTIWA

- *Tinjauan Perkembangan Politik:*
 - Indonesia dan Persaingan di Pentas Global
- *Tinjauan Perkembangan Ekonomi:*
 - Pertumbuhan Kuat, Tapi Resiko Meningkat
 - Menakar Anggaran Belanja Negara
- *Tinjauan Perkembangan Regional dan Global:*
 - Tantangan ASEAN dan Masalah Konflik Laut China Selatan

ARTIKEL

- *Pro-Growth, Pro-Job, dan Pro-Poor* di Era Presiden SBY: Antara Harapan dan Kenyataan
- Terbaikannya Potensi Strategis Kelompok *Transient Poor* dalam Kebijakan
- Prospek Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global
- *Indigenized Good Governance* dan Akuntabilitas Sosial di Papua
- Pelanggaran HAM Seputar Jajak Pendapat di Timor Timur dan Reformasi TNI
- Masalah Keamanan dan Penyelundupan Senjata ke Wilayah Indonesia



CENTRE FOR
STRATEGIC
AND
INTERNATIONAL
STUDIES

Logo CSIS



Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sejak 1971 sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS CSIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS CSIS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis masing-masing.

Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: Nalar Ajar Terusan Budi. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjangan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi – tiadanya sikap a priori – pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat Nalar Ajar Terusan Budi yang tertera pada lingkaran piringan adalah sengkala: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus mengemukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. Nalar menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, Ajar berwatak 7, Terusan berwatak 9, dan Budi berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya menganalisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta.

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab

Vidhyandika D. Perkasa

Dewan Redaksi

J. Kristiadi, Rizal Sukma, Raymond Atje,
Medelina K. Hendytio

Redaksi Pelaksana

Faustinus Andrea

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

1829-5908

Ana

PENGANTAR RE

ANALISIS PERIS

- *Tinjauan Per*
• Indonesia
Susilo Ba
- *Tinjauan Per*
• Pertumbuh
Dewi Fria
- Menakar
Pande Ra
- *Tinjauan Per*
• Tantanga
Laut Chi
Faustinus

ARTIKEL

- *Pro-Growth, I*
Presiden SBY
Mudrajat Kam
- *Tetapaikanny*
Transient Poo
Titiok Kartika I
- *Prospek Eksp*
di Pasar Glob
Fajar B. Hirana
- *Indigenized G*
Akuntabilitas
Vidhyandika D.
- *Pelanggaran F*
di Timor Tim
Agus Widjojo
- *Masalah Keam*
ke Wilayah In
Poltak Partogi I

TIONAL
nyajikan
asional.
ara staf
SIS akan
tulisan-
menjadi

igo baru:
k sebuah
ia yang
a busana
alaskan
uku dan
mbarkan
nba dari
bangan
S, seperti
mbar ini
guraikan
dangan
krawala
Terusan
engkala:
itu tahun
nukakan
ditandai
watak 7,
azimnya
berdiri.
ran, dan
an, yang
mpunyai
an tetapi
Makna
; belajar
udi yang
oleh G.

Analisis CSIS

Vol. 40, No. 3, September 2011

ISSN 1829-5908

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

255 – 258

ANALISIS PERISTIWA

- *Tinjauan Perkembangan Politik:*
 - **Indonesia dan Persaingan di Pentas Global**
Susilo Bambang Yudhoyono 259 – 272
- *Tinjauan Perkembangan Ekonomi*
 - **Pertumbuhan Kuat, Tapi Resiko Meningkatkan**
Deni Friawan 273 – 284
 - **Menakar Anggaran Belanja Negara**
Pande Radja Silalahi 285 – 296
- *Tinjauan Perkembangan Regional dan Global:*
 - **Tantangan ASEAN dan Masalah Konflik Laut China Selatan**
Faustinus Andrea 297 – 309

ARTIKEL

- *Pro-Growth, Pro-Job, dan Pro-Poor di Era Presiden SBY: Antara Harapan dan Kenyataan*
Mudrajad Kuncoro 310 – 343
- *Terbaikannya Potensi Strategis Kelompok Transient Poor dalam Kebijakan*
Titiek Kartika Hendrastiti dan Djonet Santoso 344 – 374
- *Prospek Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global*
Fajar B. Hirawan dan Skotlastika Indasari 375 – 399
- *Indigenized Good Governance dan Akuntabilitas Sosial di Papua*
Vidhyandika D. Perkasa 400 – 427
- *Pelanggaran HAM Seputar Jajak Pendapat di Timor Timur dan Reformasi TNI*
Agus Widjojo 428 – 444
- *Masalah Keamanan dan Penyelundupan Senjata ke Wilayah Indonesia*
Poltak Partogi Nainggolan 445 – 479

Terbaikannya Potensi Strategis Kelompok *Transient Poor* dalam Kebijakan

Titiek Kartika Hendrastiti dan Djonet Santoso

Jumlah penduduk Indonesia yang termasuk klasifikasi *transient poor* ternyata cukup besar, bahkan lebih besar dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan itu sendiri. Ironisnya, kondisi mereka "tersembunyi" kurang diakui eksistensinya oleh para pengambil kebijakan. Konsekuensinya, banyak program penanggulangan kemiskinan lebih banyak diarahkan pada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara kelompok *transient poor* yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dianggap telah mandiri sehingga kurang mendapat prioritas. Bias dan kegagalan program-program penanggulangan kemiskinan selama ini diduga salah satunya disebabkan oleh tidak dikenalnya potensi konflik kepentingan antara kelompok *transient poor* dan kelompok sasaran program-program kemiskinan tersebut. Studi ini bertujuan untuk membuka wacana tentang fenomena *transient poverty*, yang dapat dijadikan salah satu komponen sosial dalam pembangunan manusia dan penyempurnaan strategi daerah atau nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Hasil studi ini memberi gambaran tentang dimensi sosial kelompok *transient poor*, dan menemukan peran strategis dari kelompok ini dalam "mendukung" perubahan sosial pada kelompok miskin perkotaan. Studi ini juga menghasilkan rancangan model penguatan kelompok *transient poor*.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 1997, dan berlanjut dengan resesi ekonomi global tahun 2008 telah

membawa dampak y
kemiskinan adalah bert
sikan. Fenomena itu
di Indonesia, yaitu "
jumlah besar. Istilah f
atau menggambarkan
klasifikasi rentan mi
kelompok hampir mi
dekat miskin (Ma'ruf
sedikit di atas garis k

Dari dimensi eko
yang tidak termasuk
kemiskinan, sehingga n
program untuk pena
kelompok ini sangat re
di lingkungan sekitar
jakan kenaikan harga
variasi misalnya, past
bersifat negatif terhad
mempengaruhi pendi
oleh kenaikan harga
inflasi negatif. Padal
dipastikan tidak aka
yang ada.

Penegasian eksis
plikasi serius sebaga
gram penanggulang
kelompok ini didug
tercapainya tujuan-
miskin. Diantara, ke
kelompok *transient p*
terutama yang bertai
ekonomi lain yang t
2007; UNFPA 2007).

Secara matemati
sient poor berjumlah

memiliki dampak yang luas. Salah satu yang terkait dengan kemiskinan adalah bertambahnya jumlah orang miskin secara signifikan. Fenomena itu mendorong munculnya sebuah realita baru di Indonesia, yaitu "terbentuknya" kelompok *transient poor* dalam jumlah besar. Istilah *transient poverty* dipergunakan untuk menunjuk atau menggambarkan kelompok masyarakat yang masuk dalam klasifikasi rentan miskin, atau kemiskinan sementara (BPS 2006), kelompok hampir miskin (Bank Dunia 2006), kelompok masyarakat dekat miskin (Ma'ruf 2006), atau kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (Bappenas 2006).

Dari dimensi ekonomi, mereka itu adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk miskin tapi posisinya sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga mereka tidak memperoleh subsidi dari banyak program untuk penanggulangan kemiskinan dari pemerintah. Kelompok ini sangat rentan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara ekonomi maupun sosial. Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan berbagai variasi misalnya, pasti berdampak langsung dan memicu inflasi yang bersifat negatif terhadap kesejahteraan kelompok *transient poor* karena mempengaruhi pendapatan riilnya. Kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh kenaikan harga pokok lainnya yang akan memicu terjadinya inflasi negatif. Padahal, kelompok masyarakat *transient* ini dapat dipastikan tidak akan mendapatkan subsidi program kemiskinan yang ada.

Penegasian eksistensi kelompok *transient poor* selama ini berimplikasi serius sebagai penghambat pencapaian tujuan program-program penanggulangan kemiskinan. Jika diakui keberadaannya, kelompok ini diduga justru akan mampu berperan mempercepat tercapainya tujuan-tujuan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Diantara, kekuatan strategi bertahan hidup (*survival*) dari kelompok *transient poor* adalah dari kekuatan kelompok perempuan, terutama yang bertahan pada sektor informal dan berbagai kegiatan ekonomi lain yang tidak terakui dalam konteks "pasar" (INSTRAW 2007; UNFPA 2007).

Secara matematis, mereka yang tergolong dalam kelompok *transient poor* berjumlah 49 persen dari total penduduk. Karena jumlah-

kelompok
bijakan

t Santoso

nsient poor
ng berada di
rsebutnya"
sekuensinya,
nalkan pada
ok transient
lah mandiri
an-program
disebabkan
ok transient
at. Studi ini
werty, yang
an masalah
nggulan
nensi sosial
kelompok ini
otaan. Studi
nsient poor.

ajak tahun
2008 telah

nya yang potensial, studi potensi *transient poverty* merupakan upaya langkah maju pengembangan kebijakan kemiskinan yang lebih komprehensif. Hasil-hasil penelitian terdahulu secara jelas juga mengindikasikan peran strategis kelompok *transient poor* pada usaha-usaha *survival* kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan (lihat Suselo 2008; Peilouw 2007; Harmadi 2007; Muyanga dkk. 2007; Santoso dan Hendrastiti 2006, 2007; Smith and Middleton 2007; Bhata and Sharma 2006; Hutahaean 2006; Karnesih 2005; Santoso dan Hendrastiti 2005; Kurosaki 2005; Destama 2004; Rahayu 2004; Sari 2004; Mochtar 2001; Jalan and Ravallion 1998).

Penelitian ini mencoba memahami dimensi sosial kerentanan dan pola *survival* kelompok *transient poor*. Dengan melihat polanya, maka artikel ini mencoba untuk mengkreasi model pemberdayaan yang dapat mendukung strategi *survival* bagi kelompok itu, termasuk pada kelompok perempuan. Dengan model pemberdayaan tersebut kebijakan publik yang merespon persoalan *transient poverty* masyarakat di wilayah perkotaan di masa-masa mendatang bisa disusun.

KONTEKS TRANSIENT POVERTY DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2006 sebesar 39,05 juta atau 17,75 persen, dengan garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat penghasilan sebesar 1,55 dollar AS (BPS, 2006). Bergeser sedikit di atas garis kemiskinan, analisis Bank Dunia (2006) menunjukkan, 49 persen atau lebih dari 100 juta penduduk Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS per hari. Bank Dunia (2006) memperhitungkan 108,78 juta orang dari total penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Lebih jauh diungkapkan bahwa terdapat perbedaan sangat tipis antara penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan penduduk yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Disebutkan dalam kajian Bank Dunia tersebut, angka kemiskinan nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkesan menyembunyikan kenyataan tentang sedemikian besarnya kelompok masyarakat Indonesia yang sangat rentan untuk menjadi miskin (*transient poor*). Padahal, tingkat pergeseran status ekonomi

antara kelompok rakyat ketat. Lebih dari 38 persen misalnya, tidak tergolong lanjut digarisbawahi, namun menjadi lebih serius jika batas penghasilan hari

Selain itu, harus aculaki dan kemiskinan pada kelompok tersebut berdasarkan data kemiskinan dunia kemiskinan perempuan laki, yaitu 13,8 persen teridentifikasi bahwa an perempuan dan laki (Cawthorne 2008). Data dari situasi kelompok alasan fenomena kemis

Beberapa indikator *Human Development G* dari negara-negara lain sen anak-anak berusia menderita gizi buruk. di Indonesia 307 per 1000 jiwa dari angka kematian dari angka kematian ibu pada tahun 2008 hidup. Tahun 2010 in dup. Namun prestasir dengan tahun 2015 tu

Akses penduduk nitasi juga menjadi n rankan, pengentasan ngan mengefektifkan belanja negara untuk

antara kelompok rakyat miskin dan kelompok hampir miskin relatif meningkat. Lebih dari 38 persen rumah tangga miskin pada tahun 2006 misalnya, tidak tergolong miskin pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut digaribawahi, masalah kemiskinan di Indonesia diyakini akan menjadi lebih serius jika kemiskinan tidak diukur semata berdasarkan batas penghasilan harian (Bank Dunia 2006).

Selain itu, harus ada pembedaan analisis antara kemiskinan laki-laki dan kemiskinan perempuan karena perbedaan status sosial dua kelompok tersebut mewarnai gambaran kemiskinan. Secara khusus, data kemiskinan dunia tahun 2007 menunjukkan bahwa rata-rata kemiskinan perempuan lebih besar dari rata-rata kemiskinan laki-laki, yaitu 13,8 persen dibanding 11,1 persen. Untuk kawasan Asia teridentifikasi bahwa kesenjangan persentase rata-rata kemiskinan perempuan dan laki-laki adalah 10,7 persen banding 9,7 persen (Cawthorne 2008). Data ini memberi bukti bahwa melihat kemiskinan dari situasi kelompok perempuannya akan lebih mempertajam penjelasan fenomena kemiskinan itu sendiri.

Beberapa indikator terkait tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) menunjukkan Indonesia tertinggal dari negara-negara lain di Asia (Bank Dunia 2006). Sejumlah 25 persen anak-anak berusia di bawah lima tahun di Indonesia digolongkan menderita gizi buruk. Sampai dengan tahun 2002 angka kematian ibu di Indonesia 307 per 100.000 kelahiran hidup, atau tiga kali lebih tinggi dari angka kematian ibu di Vietnam, serta enam kali lebih tinggi dari angka kematian ibu di China dan Malaysia. Bahkan angka kematian ibu pada tahun 2009 pernah mencapai 420 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2010 ini turun menjadi: 228 per 100.000 kelahiran hidup. Namun prestasinya tetap buruk di Asia Tenggara. Target sampai dengan tahun 2015 turun ke 103 per 100.000 kelahiran.¹

Akses penduduk terhadap pendidikan, sarana air bersih dan sanitasi juga menjadi masalah krusial. Kajian Bank Dunia ini menyarankan, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan pemerintah dengan mengaktifkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan belanja negara untuk kepentingan masyarakat miskin. Pertumbuhan

¹ www.sabili.co.id

ekonomi akan lebih berpihak pada masyarakat miskin jika revitalisasi pertanian diimplementasikan bersamaan dengan pengembangan infrastruktur pedesaan. Sementara, pelayanan publik mensyaratkan adanya reformasi birokrasi. Pembentukan birokrasi itu, antara lain terkait dengan pertanggungjawaban penyediaan layanan publik yang selama ini kerap tak jelas. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu mengelola anggaran secara lebih efektif dan transparan untuk kepentingan masyarakat miskin. Terkait dengan pengelolaan anggaran, Bank Dunia (2006) menilai, kapasitas pemerintah daerah yang tidak merata, kerap menjadi kendala bagi pengentasan kemiskinan.

Di antara 135 negara berkembang, *Human Poverty Index* (HPI) Indonesia ada pada urutan 69, di atas Sri Lanka (Tabel 1). Dalam indeks tersebut, indikator *probability of not surviving past age 40* adalah 8,7 persen pada urutan 53, di atas Maroko. Indikator *adult illiteracy rate* adalah 9,0 persen pada urutan 42, di bawah Malaysia.

Tabel 1
Beberapa Indikator Kemiskinan Indonesia, 2006

<i>Human Poverty Index (HPI-1) 2006</i>	<i>Probability of not surviving past age 40 (%) 2005</i>	<i>Adult illiteracy rate (%ages 15 and older) 2006</i>	<i>People without access to an improved water source (%) 2006</i>	<i>Children underweight for age (% ages 0-5) 2006</i>
1. Czech Republic (1.7)	1. Singapore (1.8)	1. Cuba (0.2)	1. Bosnia and Herzegovina (1)	1. Croatia (1)
67. Sri Lanka (16.9)	51. Morocco (8.2)	40. Mexico (8.3)	71. Myanmar (20)	104. Liberia (26)
68. Maldives (17.1)	52. Jamaica (8.3)	41. Malaysia (8.5)	72. Ghana (20)	105. Philippines (28)
69. Indonesia (17.2)	53. Indonesia (8.7)	42. Indonesia (9.0)	73. Indonesia (20)	106. Indonesia (28)
70. Belize (17.5)	54. Vanuatu (8.8)	43. Sri Lanka (9.2)	74. Nicaragua (21)	107. Central African Republic (29)
71. Algeria (18.1)	55. Trinidad and Tobago (9.1)	44. Zimbabwe (9.3)	75. Lesotho (22)	108. Nigeria (29)
135. Afghanistan (60.2)	135. Zimbabwe (57.4)	127. Mali (77.1)	123. Afghanistan (78)	135. Bangladesh (48)

Sumber: United Nations Development Program (UNDP), 2007.

Telah banyak k
susun oleh pemerin
yang mendasar ad
memperbesar jumla
transient poor ke da
berdampak pada p
masih banyaknya
menuhan dan perl
pendudukan, keti
pembangunan per
cepatan pembangu
tangan.

Berita Resmi St
Pusat Statistik (BPS
miskin periode Fe
duduk per Februar
arisbawahi bahwa
dan penambahan
yang menjadi misl
hun 2006 menjadi

Mutasi pe

Periode	
Februari 2005	Pd Pd Pd Pd
Maret 2006	Pd Pd Pd Pd
Maret 2007	Pd

Sumber: Susenas Panel 20

Telah banyak kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan disusun oleh pemerintah dan telah pula diimplementasikan. Persoalan yang mendasar adalah bahwa kebijakan-kebijakan tersebut justru memperbesar jumlah masyarakat miskin dengan masuknya kelompok *transient poor* ke dalamnya. Kajian terhadap berbagai kebijakan yang berdampak pada pemecahan masalah kemiskinan mengindikasikan masih banyaknya permasalahan di lapangan, terutama pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin, kependudukan, ketidaksetaraan dan keadilan gender, percepatan pembangunan perdesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, percepatan pembangunan kawasan tertinggal, dan peluang dan tantangan.

Berita Resmi Statistik per 1 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan angka-angka mutasi penduduk miskin periode Februari 2005 – Maret 2007 (Tabel 2). Jumlah penduduk per Februari 2005 adalah sebanyak 35,1 juta orang. Dapat digarisbawahi bahwa dari jumlah tersebut, terdapat selisih pengurangan dan penambahan penduduk yang keluar dari miskin dan penduduk yang menjadi miskin. Jumlah penduduk miskin meningkat pada tahun 2006 menjadi sebanyak 39,3 juta orang.

Tabel 2
Mutasi penduduk miskin Februari 2005 – Maret 2007
(dalam jutaan orang)

Periode	Keadaan penduduk	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Februari 2005	Pddk miskin	12,4	22,7	35,1
	Pddk keluar dari miskin	5,5	9,7	15,2
	Pddk tetap miskin	6,9	13,0	19,9
	Pddk menjadi miskin	7,6	11,8	19,4
Maret 2006	Pddk miskin	14,5	24,8	39,3
	Pddk keluar dari miskin	7,8	12,9	28,7
	Pddk tetap miskin	6,7	11,9	18,6
	Pddk menjadi miskin	6,9	11,7	18,6
Maret 2007	Pddk miskin	13,6	23,6	37,2

Sumber: Susenas Panel 2005, 2006, 2007 (diolah) Pada Berita Resmi Statistik, 1 Juli 2007.

Walaupun dari tabel di atas nampak jelas keberadaan masyarakat kelompok *transient poor* yang ditunjukkan dengan angka-angka jumlah penduduk yang keluar dari miskin dan jumlah penduduk yang menjadi miskin, banyak kebijakan publik mengenai penanggulangan kemiskinan tidak secara khusus ditujukan bagi pemberdayaan kelompok itu. Banyak kebijakan publik lebih fokus pada penanganan penduduk kelompok miskin sekali (*chronic poor*). Berbeda dari data BPS tersebut, Bank Dunia (2006) memperhitungkan 108,78 juta orang dari total penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Terdapat perbedaan sangat tipis antara penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan penduduk yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Disebutkan dalam kajian Bank Dunia tersebut, angka kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS terkesan menyembunyikan kenyataan tentang sedemikian besarnya kelompok masyarakat Indonesia yang sangat rentan untuk menjadi miskin ini.

Tulisan Panimbang (2007) mengidentifikasi telah terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006. Sekitar 56,51 persen penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, sisanya berpindah posisi menjadi tidak miskin. Sebaliknya, 30,29 persen penduduk hampir miskin di bulan Februari 2005 jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82 persen penduduk hampir tidak miskin di bulan Februari 2005 juga jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Bahkan 2,29 persen penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin di bulan Maret 2006. Perpindahan posisi penduduk ini menunjukkan jumlah kemiskinan sementara (*transient poverty*) cukup besar.

Tabel 3
Jumlah dan persentase penduduk hampir miskin di Indonesia, 2005

Daerah	Jumlah (juta)	Persentase
Perkotaan	7,9	8,7
Perdesaan	18,3	15,2
Nasional	26,2	11,97

Sumber: BPS 2006

Seperti yang telah di Indonesia hingga yang sebagian besar bahwa hal itu disebabkan ini. Kesempatan kerja nilai tambah dan perdagangan dan perdagangan perdesaan. Di per sektor pertanian yang rendah.

Kemiskinan yang dan *stereotype* yang hari. Kemiskinan untuk beraktivitas menunjukkan secara makro sebagai kategori miskin, dalam bidang pendidikan perempuan, pelayanan perempuan, mengakibatkan oleh asumsi untuk perempuan pengambilan keputusan kebutuhan

Di banyak literatur *transient poverty*, mengenai determinan yang jarang "wajib" dibahas. Banyak mengarah pada p

Review Fenomena

Transient poverty berkembang baik China, Jalan dan merupakan dete

Seperti yang terlihat di tabel 3, jumlah penduduk hampir miskin di Indonesia hingga Februari 2005 tercatat sebanyak 26,2 juta orang yang sebagian besar terdapat di perdesaan. Studi menunjukkan bahwa hal itu disebabkan oleh pembangunan yang timpang selama ini. Kesempatan kerja, khususnya di sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah dan pendapatan/gaji tinggi seperti industri, perbankan dan perdagangan modern jauh lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan. Di perdesaan kesempatan kerja masih didominasi oleh sektor pertanian yang menghasilkan nilai tambah dan upah relatif rendah.

Kemiskinan yang dialami oleh perempuan membentuk identitas dan *stereotype* yang berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Kemiskinan sangat signifikan menghambat langkah mereka untuk beraktivitas. Human Development Report Indonesia (2004) menunjukkan gambaran kemiskinan pada kelompok perempuan secara makro sebagai berikut: 2/3 perempuan di dunia termasuk kategori miskin, perempuan masih tertinggal dan ditinggalkan dalam bidang pendidikan, di Indonesia 65% anak tidak sekolah adalah perempuan, pelayanan kesehatan tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan, angka kematian ibu tinggi, yang salah satunya disebabkan oleh asupan gizi yang buruk, pendapatan hanya 38 persen untuk perempuan, masih sedikitnya perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan, anggaran pembangunan masih belum merespon kebutuhan perempuan.

Di banyak literatur dan diskusi telah menyinggung mengenai *transient poverty*, tetapi tidak banyak ditemukan diskusi mendalam mengenai determinan *transient poverty* itu sendiri. Juga masih sangat jarang "wajah" perempuan pada kelompok *transient poverty* ini dibahas. Banyak diskusi tentang determinan kemiskinan yang lebih mengarah pada pemahaman sangat miskin atau *chronic poverty*.

Review Fenomena Transient Poverty di Berbagai Negara

Transient poverty telah menjadi tema penelitian di berbagai negara berkembang bahkan di negara maju. Sebuah studi di perdesaan China, Jalan dan Ravallion (1998) mencatat kesejahteraan keluarga merupakan determinan penting bagi miskin kronis dan *transient poor*.

Mereka juga menemukan, meskipun lokasi geografis tempat tinggal, status pendidikan, dan status kesehatan sangat penting untuk menjelaskan kemiskinan kronis, tetapi ternyata tidak signifikan untuk *transient poor*. Jalan dan Ravallion (1998) mencatat bahwa:

"Both chronic and transient poverty are reduced by greater command over physical capital, and life-cycle effects for the two types of poverty are similar. But there the similarities end. Most policies aimed at reducing chronic poverty may have little or no effect on transient poverty".

Sementara itu, penelitian di Nepal, Bhata and Sharma (2006) menemukan bahwa meskipun konsumsi per kapita rumah tangga naik pada tahun 1995/1996 dan 2002/2003, lebih dari 47% rumah tangga masih dalam kondisi miskin. Di antara mereka, 43 persen masuk dalam kemiskinan kronis dan 57% *transient poor*. Kesejahteraan keluarga, sumberdaya manusia, dan konflik horizontal diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan pada kedua jenis kemiskinan tersebut. Karakteristik yang berbeda ditemukan di United Kingdom (UK); Smith and Middleton (2007) mencatat bahwa dalam jangka waktu 8 tahun, sepertiga penduduk pernah mengalami kemiskinan *transient*. Masuk ke *transient poverty* banyak disebabkan karena skema kontrak kerja yang pendek. Banyak keluarga yang kurang mapan berada di atas garis kemiskinan, meskipun diyakini bahwa posisinya aman, tetapi sangat tidak bermanfaat jika tidak ada jaminan kelanjutannya. PHK masih memberikan pengaruh yang besar pada jatuhnya kondisi ekonomi penduduk pada tingkat *transient*.

Penjelasan berbeda disampaikan oleh Kurosaki serta Muyanga dkk. Penelitian Kurosaki (2005) di wilayah pedesaan Pakistan mencatat bahwa muncul dan hilangnya kelompok *transient poverty* lebih pada persoalan aplikasi teoritis dan pengukuran. Jumlah kelompok *transient poor* akan sangat bergantung pada teori yang dipergunakan dan instrumen yang diaplikasikan. Argumentasi yang sama telah dibuktikan oleh Muyanga dkk. (2007) dari penelitian mereka di Kenya.

Meskipun belum menjadi fokus perhatian para peneliti di tanah air, persoalan *transient poverty* telah secara tidak langsung didiskusikan. Dari hasil risetnya yang menggunakan data Susenas 2005,

Harmadi (2007) menyimpulkan bahwa pada tahun 1996 dan tidak ada perubahan dapat bahwa dalam hal ini memperlihatkan gerak yang mengindikasikan dari sudut pandang berargumentasi, perantara antara lima dan enam jumlah penduduk mumsu daripada investasi bahwa pertumbuhan menciptakan ketimpang memiliki akses terhadap memperoleh keuntungan masih lebih didominasi bangkitnya sektor struktur tenaga kerja sektor informal. Terutama rentan (*transient*) untuk tidak mendapatkan

Di wilayah pedesaan dan pesisir pemanfaatan SDA sektor pesisir. Penelitian lokal di sekitar kabupaten Seblat Bengkulu eksploitasi kawasa keterampilan, dan kecenderungan ini dalam menindaklanjuti yang di *backed up* (2005). Fenomena ini dalam penelitian tentang hutan TN

Harmadi (2007) menyimpulkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 1996 dan 2005 ternyata relatif sama. Ini memperlihatkan tidak ada perubahan kondisi kesejahteraan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa dalam hal pengangguran, pertumbuhan ekonomi memperlihatkan gerak yang searah dengan angka pengangguran. Hal ini mengindikasikan belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pasar tenaga kerja. Hampir sama, Suselo (2008) berargumentasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar antara lima dan enam persen per tahun belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan itu lebih ditopang oleh konsumsi daripada investasi. Argumentasi-argumentasi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang beranjak membaik saat ini justru menciptakan ketimpangan karena hanya sekelompok kecil saja yang memiliki akses terhadap modal yang lebih tinggi dan yang kelak memperoleh keuntungan (*return*) yang lebih besar. Pertumbuhan itu pun masih lebih didominasi oleh sektor konsumsi sebagai pendukung bangkitnya sektor perdagangan. Dampaknya tentu buruk bagi struktur tenaga kerja di mana tenaga kerja lebih banyak berpindah ke sektor informal. Tenaga kerja sektor informal harus dipahami sangat rentan (*transient*) untuk turun kelas menjadi penduduk miskin karena tidak mendapatkan keamanan kerja (*job security*).

Di wilayah perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) hutan dan pesisir dipilih sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Pemanfaatan SDA secara berlebihan mempercepat kerusakan hutan dan pesisir. Penelitian Santoso dan Hendrastiti (2005) pada masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat Bengkulu, mencatat bahwa masyarakat cenderung mengeksploitasi kawasan hutan karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan keterampilan, dan keterbatasan peluang ekonomi di desanya. Kecenderungan ini diperparah karena inkonsistensi aparat kehutanan dalam menindaklanjuti persoalan *illegal logging* oleh pengusaha kayu yang di *backed up* aparat keamanan setempat (Santoso dan Hendrastiti 2005). Fenomena itu sama dengan yang ditemukan Chomitz (2007) dalam penelitiannya yang kaya dengan data empiris dan analisa tentang hutan TNKS.

Hasil penelitian Mochtar (2001) menarik untuk disimak selain fokusnya pada peran kelembagaan lokal, penelitian ini juga sekaligus merupakan evaluasi dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program yang dimulai sejak tahun 1998 dan masih dipilih sebagai program unggulan sampai hari ini, hasilnya dinyatakan belum/tidak mencapai proses pemberdayaan bagi warga miskin, meskipun lembaga lokal telah mengupayakan kinerja sejak pada awal implementasi program. Mochtar menemukan beberapa penyebab diantaranya: (1) tidak terjadi transfer daya kepada warga miskin, sebab program lebih dimanfaatkan oleh kelompok yang mampu; (2) proses belajar sosial tidak berlangsung, sebab program lebih bernuansa ekonomi; dan (3) lembaga lokal lebih berperan sebagai penyalur kredit dari pada lembaga pemberdayaan. Di sana ada indikasi tentang pergulatan antara kelompok *chronic poor* dan *transient poor* pada program penanggulangan kemiskinan. Ini adalah catatan penting dalam studi *transient poverty*.

Studi kinerja pemerintah dalam program-program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh Karnesih (2005). Hasil penelitian mencatat bahwa walaupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, kesenjangan masih tetap tinggi dan pola yang terjadi tetap sama, yaitu persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah kinerja manajemen publik; dan desentralisasi yang dijalankan sejak tahun 1999 kurang mendorong keberdayaan kinerja elite lokal dalam komitmen dan akuntabilitas menjalankan program kemiskinan daerahnya. Penelitian Santoso dan Hendrastiti (2006; 2007) tentang kemiskinan masyarakat nelayan tradisional di wilayah Kabupaten Mukomuko Bengkulu mencatat melemahnya *social capital* diantara masyarakat nelayan dan konflik-konflik diantara mereka diperparah oleh lemahnya manajemen publik pemerintah kabupaten.

Kinerja pemerintah yang buruk juga ditemukan di Maluku Tengah. Dari hasil riset Peilouw (2007) menyebutkan tingkat dan penyebab tingginya tingkat kematian bayi pada masyarakat suku Nuaulu di Maluku Tengah adalah karena faktor-faktor sosial seperti: pendidikan, kesehatan, budaya, dan keterbatasan ekonomi rumah tangga pada masyarakat suku Nuaulu. Kebiasaan atau budaya tidak

akan menjadi masalah. Dalam konteks ini, *poli* merupakan akar persoalannya, disebabkan oleh kinerja (2006) yang memfokuskan pada tasan kemiskinan: pe- digma, dan pilihan ke- semakin memburuk- kelembagaan, kesalah- dan kesalahan dalam-

Yang menarik di- yang mengungkap sit- Studi dari Rahayu (2- menunjukkan fenom- miskin terhadap sur- kinan kawasan hutan perempuan di kawas- mengatasi kebutuhar- perempuan kawasar- mati dan ranting-rar- kemiskinan merusak- mitos.

POTRET TRANSIE- KULU

Untuk memotre- ini menggunakan m- (*Participative Poverty* oleh Bank Dunia da- *lopment Studies, Inst- Policy Management*), kro dan makro sel- serta kebijakan yang

Dengan kerang- masi mengenai per-

akan menjadi masalah jika kebutuhan sosial dan ekonomi terpenuhi. Dalam konteks ini, *political will* dan komitmen pemerintah kabupaten merupakan akar persoalannya. Memburuknya kemiskinan yang disebabkan oleh kinerja pemerintah juga ditunjukkan oleh Hutahaeen (2006) yang memfokuskan studinya pada tiga strategi untuk pengentasan kemiskinan: pengembangan kelembagaan, perubahan paradigma, dan pilihan kebijakan. Hutahaeen (2006) membuktikan bahwa semakin memburuknya kemiskinan disebabkan oleh hambatan kelembagaan, kesalahan dalam pemilihan paradigma pembangunan, dan kesalahan dalam pemilihan kebijakan.

Yang menarik dari kajian studi di atas, masih sangat jarang yang mengungkap situasi sosial kelompok *transient poor* perempuan. Studi dari Rahayu (2004), Sari (2004), dan Destama (2004) ternyata menunjukkan fenomena yang berbeda tentang respon kelompok miskin terhadap sumber daya alam. Berbeda dari gambaran kemiskinan kawasan hutan lainnya, penelitian mereka menunjukkan bahwa perempuan di kawasan hutan lindung TNKS justru mampu bertahan mengatasi kebutuhan keluarganya, sambil memelihara hutan. Karena perempuan kawasan hutan hanya mengambil kayu dari pohon mati dan ranting-ranting. Temuan ini memberi argumentasi bahwa kemiskinan merusak hutan masih perlu di kaji, karena bisa menjadi mitos.

POTRET *TRANSIENT POOR* DI DUA KOTA PROVINSI BENGKULU

Untuk memotret situasi sosial kelompok *transient poor*, penelitian ini menggunakan metode 'Penilaian Kemiskinan Secara Partisipatif' (*Participative Poverty Assessment-PPA*), seperti yang banyak digunakan oleh Bank Dunia dan lembaga kajian internasional (*Institute of Development Studies, Institute of Social Studies, Institute of Development and Policy Management*). Metode ini mengkombinasikan pendekatan mikro dan makro sekaligus mengidentifikasi persoalan di lapangan serta kebijakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Dengan kerangka analisis PPA studi ini dapat memperoleh informasi mengenai persepsi sekelompok masyarakat tentang kemiskinan,

isu-isu yang terkait dengannya, bagaimana cara mereka memandang dirinya sendiri, serta isu-isu yang terkait dengan upaya mereka untuk dapat keluar dari kemiskinan. Metode ini juga digunakan untuk mendapat gambaran tentang pandangan orang, prioritas yang dipilih, serta pengalaman dan analisis mereka mengenai kemiskinan. Penelitian ini dipertajam dengan dimensi gender, di mana pandangan, prioritas, pengalaman, dan analisis tentang kemiskinan berbeda antara laki-laki dan perempuan. PPA mencoba mencari solusi guna meningkatkan pemahaman mengenai kemiskinan, penyebabnya, penyebarannya, dan kebijakan yang efektif untuk menangani persoalan kunci.

Adapun kegiatan lapangan yang telah dilakukan antara lain: (1) pengumpulan data sekunder untuk menyusun konteks, latar belakang, dan kesimpulan hasil temuan, (2) interview terstruktur dan semi-terstruktur kepada individu dan kelompok, (3) diskusi kelompok bertema (*Focus Group Discussion* – FGD), (4) pengamatan langsung, serta (5) studi kasus dan biografi.

Potret *Transient Poverty* di Perkotaan

Secara sosiologis, struktur masyarakat Provinsi Bengkulu dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang pluralistik, baik dari segi agama, suku, dan bahasa. Homogenitas kelompok etnik asli seperti Rejang, Serawai, Lembak, dan Melayu mulai berubah sejalan dengan meningkatnya migrasi (*in-migration*) ke daerah ini baik melalui transmigrasi maupun migrasi internal antar provinsi.

Studi ini mengambil komunitas pesisir: tiga komunitas di Kota Bengkulu, dan tiga komunitas lagi di Kota Muko-Muko. Namun hampir semua desa-desa di pesisir, insiden migrasi selalu terjadi. Sehingga masyarakatnya terdiri atas kelompok nelayan asli Bengkulu, Madura, Bugis, Batak, dan Padang. Mereka biasanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu dengan wilayah operasi yang juga berbeda-beda. Dalam kehidupan kemasyarakatan, mereka lebih sering mewakili daerah, di mana mereka tinggal daripada identitas kesukuannya. Dalam kehidupan kemasyarakatan, mereka lebih sering mewakili daerah, di mana mereka tinggal daripada identitas kesukuannya. Konflik antar nelayan kadang-kadang terjadi. Namun, akar persoalannya lebih pada perselisihan wilayah tangkap antara

nelayan tradisional de
antar kelompok etnis.

Kota Bengkulu b
Hindia. Administrasi
67 kelurahan. Tiga k
sar Bengkulu, dan F
kelurahan tersebut b
sebagai pegawai ne
sebagainya. Seperti k
sentra jual beli ikan f
mulai pukul 11.00 sa
hujan disertai badai,
memilih tinggal di ru
nonton TV, main kar
seperti jala, pancing,
tetap tinggal di ruma

Berbeda dengan
syarakat di daerah
penghasilan lain sela
September sampai
penghasilan tambah
kecil-kecilan, buruh
pasar besar. Para ibu
penghasilan dengan
di beberapa keluar
mendorong *lancang*.²

Meskipun berac
tegorikan sebagai ne
mereka menggunakan
alat-alat yang masil
bahwa meskipun m
sebut sudah berlang

² Lancang: perahu kecil yan
lancang pergi pagi dan pe
itu digerakkan oleh mesir

melayan tradisional dengan nelayan pukat harimau, bukan perselisihan antar kelompok etnis.

Kota Bengkulu berada di pesisir Barat, tepat menghadap Lautan Hindia. Administrasi Kota Bengkulu mengelola 8 kecamatan dan 67 kelurahan. Tiga komunitas dipilih dari Kelurahan Malabero, Pasar Bengkulu, dan Kandang. Sekitar 70 persen penduduk di tiga kelurahan tersebut bermatapencarian sebagai nelayan, selebihnya sebagai pegawai negeri, pedagang, swasta, buruh/tukang, dan sebagainya. Seperti kelurahan pesisir lain, *setting* studi ini merupakan sentra jual beli ikan hasil tangkapan laut, yang biasanya berlangsung mulai pukul 11.00 sampai pukul 18.00 pada cuaca normal. Jika turun hujan disertai badai, sebagian besar nelayan tidak berani melaut dan memilih tinggal di rumah. Mereka menghabiskan waktu dengan menonton TV, main kartu seharian, atau memperbaiki alat-alat melaut seperti jala, pancing, perahu, motor, dan sebagainya. Mereka biasa tetap tinggal di rumah selama beberapa hari sampai badai mereda.

Berbeda dengan masyarakat nelayan di pesisir perdesaan, masyarakat di daerah ini memiliki kesempatan mencari tambahan penghasilan lain selain melaut. Jika musim badai seperti bulan-bulan September sampai Januari, mereka memutuskan untuk mencari penghasilan tambahan secara serabutan dengan cara berdagang kecil-kecilan, buruh bangunan, atau sebagai tenaga kuli angkut di pasar besar. Para ibu rumah tanggapun ikut aktif mencari tambahan penghasilan dengan berjualan gorengan, membantu mencuci pakaian di beberapa keluarga, mengumpulkan batubara, sampai buruh mendorong *lancang*.²

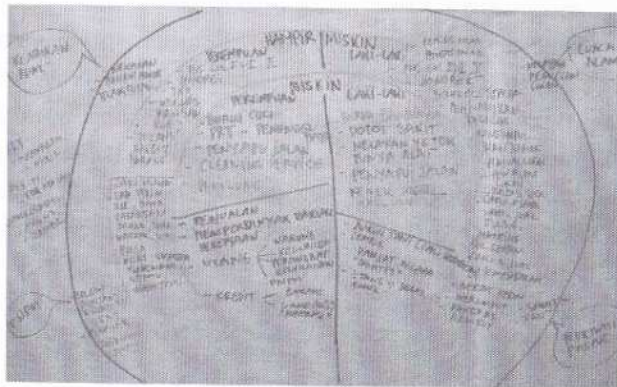
Meskipun berada di kota, sebagian besar nelayan masih dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Perahu dan alat tangkap yang mereka pergunakan sehari-hari masih sangat sederhana. Penggunaan alat-alat yang masih sederhana ini menunjukkan dua hal. *Pertama* bahwa meskipun meskipun matapencarian sebagai nelayan tersebut sudah berlangsung secara turun temurun, tetapi hampir dapat

² Lancang: perahu kecil yang digunakan untuk mencari ikan disekitar pantai, biasanya nelayan lancang pergi pagi dan pulang siang. Kiri-kanan lancang ada kayu penyeimbang, dan perahu itu digerakkan oleh mesin kecil. Biasanya cukup untuk dua orang nelayan.

dikatakan tidak ada perubahan sosial – ekonomi yang signifikan selama berpuluh-puluh tahun. *Kedua*, hal ini juga menunjukkan bahwa cara-cara menangkap ikan juga dilakukan dengan cara yang sangat tradisional. Hal ini menyebabkan perolehan ikan mereka tidak bisa optimal. Penghasilan yang minim diduga menyebabkan lambatnya perubahan sosial ekonomi mereka selama ini.

Pembelajaran studi ini tentang persepsi kelompok masyarakat tentang kemiskinan dan hampir miskin, isu-isu yang terkait, bagaimana cara mereka memandang dirinya sendiri, dan pemikiran membuat prioritas solusi kemiskinan digali melalui *Focus Group Discussion* (FGD). FGD di lokasi komunitas riset urban dilakukan secara berjenjang dari masing-masing kelurahan sampai di tingkat kota. Mereka yang terlibat FGD di tingkat Kota adalah representasi pengurus RT/dusun, dan perangkat kelurahan, dan masyarakat sekitar yang peduli, dan mereka ini adalah yang termasuk kelompok hampir miskin. FGD dilaksanakan dalam 2 tahap. *Pertama*, eksplorasi persepsi peserta mengenai pengkategorian kelompok miskin dan *transient poverty* dengan membagi ke dalam dua kelompok besar perempuan dan laki-laki, cara-cara survival kedua kelompok tersebut, dan variabel-variabel eksternal yang berpengaruh. Tahap *kedua* eksplorasi pemikiran dan harapan peserta keluar dari berbagai persoalan *transient poverty*.

Gambar 1
Pemetaan miskin dan *transient poor* di wilayah Pesisir Kota Bengkulu



Dari gambar di atas, terlihat bahwa kelompok miskin yang termasuk dalam kategori miskin, pembantu rumah tangga, cleaning service, dan kelompok miskin laki-laki yang bekerja di perkebunan sawit, nelayan yang tidak memiliki mobil angkutan, termasuk masyarakat yang termasuk dalam kategori *poor* (perempuan termasuk dalam kategori *poor*) perempuan termasuk dalam kategori *poor* kerja sukarela, warung kecil, dan kelompok miskin Kategori untuk kelompok miskin golongan I dan II, termasuk dalam kategori miskin ikan keliling, pengumpul sampah, dan tukang ojek.

Kelompok miskin yang termasuk dalam kategori kegiatan-kegiatan ekonomi yang bervariasi, variasi pekerjaan, atau termasuk dalam kategori menghimpun modal, termasuk dalam kategori perangkat kelurahan, termasuk dalam kategori kelompok miskin laki-laki yang termasuk dalam kategori kegiatan ekonomi di rumah, termasuk dalam kategori kelapa, berhutang ke keluarga, termasuk dalam kategori miskin perempuan yang termasuk dalam kategori kegiatan ekonomi di rumah, termasuk dalam kategori kue, bawa dagangan, termasuk dalam kategori marketing (MLM) ke rumah, termasuk dalam kategori mentara kelompok miskin yang termasuk dalam kategori milih kegiatan-kegiatan ekonomi seperti menjual pulsa, termasuk dalam kategori bakar, tebas kebun, termasuk dalam kategori

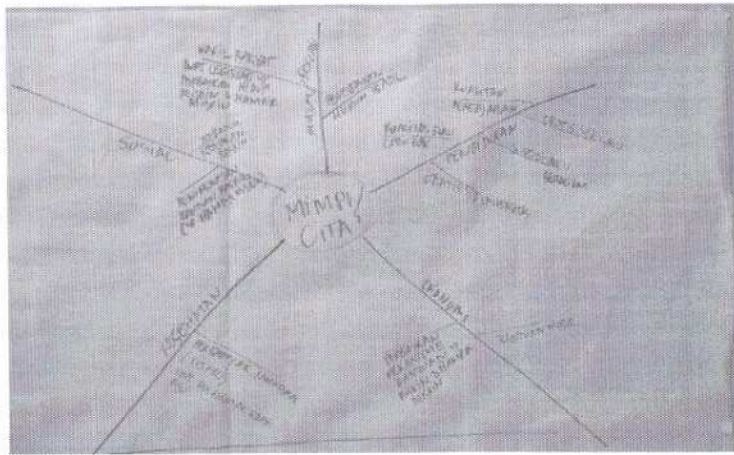
Variabel-variabel yang termasuk dalam kategori ekonomi mereka termasuk dalam kategori fluktuasi harga untuk kebutuhan pokok, termasuk dalam kategori harga BBM untuk transportasi, termasuk dalam kategori kebijakan pemerintah yang termasuk dalam kategori menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

Dari gambar di atas terungkap bahwa kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin perempuan adalah buruh cuci, pembantu rumah tangga, penunggu anak/bayi, penyapu jalan, cleaning service, dan pemulung (Gambar 1). Kategori untuk kelompok miskin laki-laki terdiri dari buruh bangunan, buruh dodot sawit, nelayan yang tidak punya alat tangkap, penyapu jalan, kenek mobil angkutan, termasuk juga pemulung. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori hampir miskin (*transient poor*) perempuan termasuk PNS golongan I dan II, honorer, tenaga kerja sukarela, warung manisan dan kue, dan tukang kredit barang. Kategori untuk kelompok hampir miskin laki-laki termasuk PNS golongan I dan II, honorer, petugas parkir, petugas pasar, penjual ikan keliling, pengumpul ikan kering, penyelam lokan, penjual lokan, dan tukang ojek.

Kelompok miskin perempuan melakukan *survival* dengan memilih kegiatan-kegiatan ekonomi berjualan kecil-kecilan, memperbanyak variasi pekerjaan, atau berusaha menutupi kekurangan dan atau menghimpun modal dengan cara berhutang ke warung, keluarga, perangkat kelurahan, Program PNPM, atau kredit koperasi. Kelompok miskin laki-laki melakukan *survival* dengan memilih kegiatan-kegiatan ekonomi dengan serabutan, buruh tani, lembur, panjat kelapa, berhutang kepada keluarga. Di sisi lain, kelompok hampir miskin perempuan melakukan *survival* dengan memilih kegiatan-kegiatan ekonomi dengan mencari usaha-usaha lain seperti membuat kue, bawa dagangan orang, buka warung, jual pulsa, multi level marketing (MLM) kosmetik, *tupperware*, sepatu, dan lain-lain. Sementara kelompok miskin laki-laki melakukan *survival* dengan memilih kegiatan-kegiatan ekonomi dengan mencari usaha-usaha lain, seperti menjual pulsa, memancing, sol sepatu, cari dan jual kayu bakar, tebas kebun, merumput, pangkas rambut, dan lain-lain.

Variabel-variabel eksternal yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi mereka terdiri dari cuaca buruk untuk para nelayan, fluktuasi harga untuk para pekebun sawit atau karet, kenaikan harga BBM untuk para nelayan dan tukang ojek atau angkutan. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah seringkali juga dipandang menyebabkan ketidakpastian nasib mereka.

Gambar 2
Harapan solusi miskin dan *transient poor* di wilayah
Pesisir Kota Bengkulu



Untuk dapat keluar dari lingkaran setan kemiskinan, baik bagi kelompok miskin maupun hampir miskin, diperlukan langkah-langkah konkret dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk bidang ekonomi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah bantuan modal dan perbaikan mekanisme bantuan untuk masyarakat miskin dan hampir miskin (Gambar 2). Di bidang pendidikan, antara lain peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas pengajaran, pendidikan gratis sampai ke universitas, serta gratis buku dan seragam sekolah. Untuk bidang kesehatan antara lain, perbanyak Jemkesmas dan pelayanan gratis Puskesmas dan Rumah Sakit. Untuk bidang sosial perlu dilakukan penyempurnaan bantuan Beras Miskin (Raskin) dan pengembangan program memasukkan kelompok hampir miskin. Di bidang hukum dan politik diperlukan usaha-usaha penegakan hukum yang adil bagi semua.

Potret *Transient Poverty* di Kota Berciri Perdesaan

Pasar Ipuh, Pasar Bantal, dan Pasar Mukomuko adalah tiga komunitas desa pesisir di Kabupaten Mukomuko yang menjadi *setting* studi. Kabupaten Muko-Muko lokasinya berada di sebelah utara

Provinsi Bengkulu, sekini Pada umumnya kondisi subur, bahkan cenderung dapat dikatakan tidak boleh penduduk setempat pencaharian pokok ma perempuan menjalankan bahan-bahan kebutuhan Ada juga pegawai ne (angkutan pedesaan). I tersebut, laut adalah t mampu memberikan p kehidupan yang baik, b menggantungkan hidup mereka ternyata juga bertahan dan tinggal d eksodus ke daerah lain

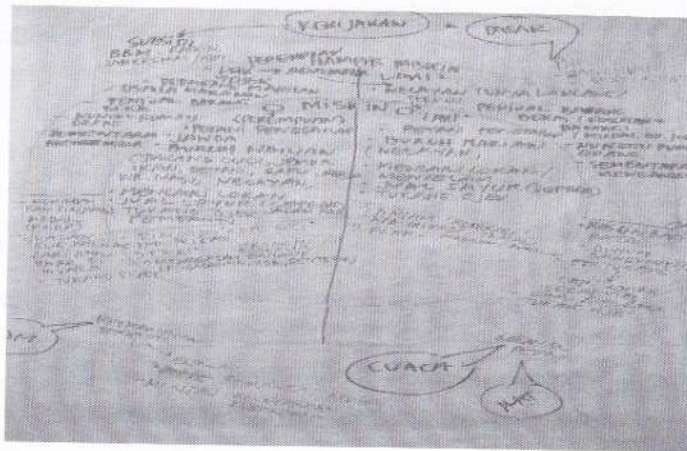
Pemetaan mis Pesi



FGD di komunitas
 lihatkan bahwa peserta

Provinsi Bengkulu, sekitar 200-300 km sebelah utara Kota Bengkulu. Pada umumnya kondisi tanah di wilayah tiga desa tersebut tidak subur, bahkan cenderung agak keras serta aktivitas pertanian sawah dapat dikatakan tidak berkembang dan karenanya tidak diusahakan oleh penduduk setempat. Dalam kondisi geologis seperti itu, mata pencaharian pokok masyarakat adalah sebagai nelayan. Sebagian perempuan menjalankan kegiatan ekonomi kecil, seperti warung bahan-bahan kebutuhan keseharian masyarakat, pedagang keliling. Ada juga pegawai negeri, dan pengusaha angkutan penumpang (angkutan pedesaan). Bagi sebagian besar penduduk di tiga desa tersebut, laut adalah tempat mereka bergantung. Aktivitas melaut mampu memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai taraf kehidupan yang baik, bila dibandingkan dengan kelompok lain yang menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Selain itu, aktivitas mereka ternyata juga mampu mengendalikan mereka untuk tetap bertahan dan tinggal di daerahnya sendiri, tanpa harus melakukan eksodus ke daerah lain.

Gambar 3
Pemetaan miskin dan *transient poor* di Komunitas Pesisir Kabupaten Mukomuko



FGD di komunitas perdesaan Kabupaten Mukomuko memperlihatkan bahwa peserta mengidentitaskan kategori kelompok miskin

dan hampir miskin perempuan adalah petani penggarap, janda, buruh harian, tukang cuci, jemur ikan, petani, tukang sapu, kerja di warung nasi, nelayan, mencari lokan, jual sayur keliling dengan sepeda atau jalan kaki, tukang ojek, dan pembantu rumah tangga (Gambar 3). Kategori untuk kelompok miskin dan hampir miskin laki-laki terdiri dari petani penggarap, buruh harian, nelayan, mencari (menyelam) lokan, jual sayur keliling dengan sepeda, dan tukang ojek. Lalu, kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori hampir miskin perempuan termasuk orang yang terkena PHK, pedagang manisan, usaha makanan, penjual barang bekas, nunggu rumah orang, sementara menganggur. Kategori untuk kelompok hampir miskin laki-laki termasuk tukang ojek, nelayan punya lancang atau perahu, penjual barang bekas, nunggu rumah orang, sementara menganggur.

Kelompok miskin perempuan melakukan *survival* dengan memilih kegiatan-kegiatan pinjam uang ke koperasi atau pribadi, pinjaman ekonomi bergulir program PNPM, menggadaikan barang ke pegadaian, saudara, atau rentenir. Peserta FGD mengemukakan biasanya kelompok miskin laki-laki melakukan *survival* dengan memilih kegiatan-kegiatan pinjam uang ke koperasi atau pribadi, dan pinjaman ekonomi bergulir program PNPM. Sementara, kelompok hampir miskin perempuan melakukan *survival* dengan memilih kegiatan-kegiatan ekonomi jual kue keliling, pinjaman ekonomi bergulir PNPM, dan tukang pijat. Sedangkan prioritas kelompok miskin laki-laki melakukan *survival* adalah kegiatan-kegiatan buruh bangunan, serabutan, tukang pijat, dan pembagian raskin secara merata.

Variabel-variabel eksternal yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi mereka terdiri dari cuaca buruk untuk para nelayan, fluktuasi harga untuk para pekebun sawit atau karet, kenaikan harga BBM untuk para nelayan dan tukang ojek atau angkutan. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah seringkali juga dipandang menyebabkan ketidakpastian nasib mereka.

Mirip dengan suara peserta FGD di Kota Bengkulu, respon terhadap kemiskinan, baik bagi kelompok miskin maupun hampir miskin, perlu campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk bidang ekonomi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah bantuan modal dan perbaikan mekanisme bantuan

untuk masyarakat misi pendidikan, antara lain kualitas pengajaran, p gratis buku dan seraga perbanyak Jamkesmas Sakit. Untuk bidang se Beras Miskin (Raskin kelompok hampir mis usaha-usaha penegaka

Harapan s komunit

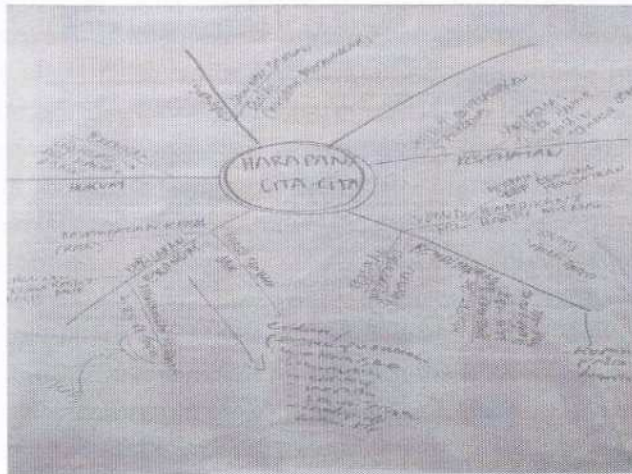


Menginterpretasikan

Analisis kebijakan kepada dua masalah masyarakat dan pe layanan sosial bagi swasta masih saja bagi kelompok masy *transient poor*. Pertan

untuk masyarakat miskin dan hampir miskin (Gambar 4). Di bidang pendidikan, antara lain peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas pengajaran, pendidikan gratis sampai ke universitas, serta gratis buku dan seragam sekolah. Untuk bidang kesehatan antara lain perbanyak Jamkesmas dan pelayanan gratis Puskesmas dan Rumah Sakit. Untuk bidang sosial perlu dilakukan penyempurnaan bantuan Beras Miskin (Raskin) dan pengembangan program memasukkan kelompok hampir miskin. Di bidang hukum dan politik diperlukan usaha-usaha penegakan hukum yang adil bagi semua.

Gambar 4
Harapan solusi miskin dan *transient poor* di komunitas pesisir perdesaan Mukomuko



Menginterpretasikan Fenomena *Transient Poverty*

Analisis kebijakan kemiskinan pada komunitas riset menunjuk kepada dua masalah mendasar kelompok *transient poor*, yaitu layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Walaupun penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh pemerintah ataupun swasta masih saja kurang, pelayanan tersebut lebih diutamakan bagi kelompok masyarakat miskin, bukan prioritas penanganan bagi *transient poor*. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi

dimensi *fakta-miskin dari kemiskinan*. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah tetapi terutama berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses tata kelola. Kedua, ciri keragaman antara perkotaan dan perdesaan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, nyatanya ada perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di perkotaan dan perdesaan. Karena potensi kerentanan masyarakat hampir miskin untuk jatuh menjadi miskin sangat besar, membuat layanan masyarakat yang bermanfaat bagi mereka merupakan kunci dalam pemberdayaan kelompok masyarakat *transient poor* untuk bisa tetap *survive* dan tidak jatuh ke bawah, atau memberi peluang untuk bergerak ke atas.

Salah satu kritik dari studi ini untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah masih digunakannya pendekatan sektoral. Pada pendekatan sektoral, penekanan kebijakannya lebih pada program (lebih spesifik proyek) dibanding pada target yang dituju. Apa yang terjadi selama ini adalah masing-masing instansi/sector mencoba merinci sebanyak mungkin program-program yang dapat dilakukan oleh instansinya berkaitan dengan penduduk miskin. Karena *mindset* nya dengan banyak kegiatan maka banyak pula dana yang dikelola. Apakah program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata penduduk miskin sebagai target kebijakan itu menjadi nomor kedua. Kerangka kerja seperti ini secara implisit mencerminkan ketidak-efektifan dan ketidakefisienan program bagi penduduk miskin.

Kritik lain adalah soal tidak jelasnya dan tidak sinkronnya tentang siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai penduduk miskin. Masing-masing sektor meskipun di lapangan menggunakan data yang sama tetapi dalam praktiknya melakukan improvisasi sesuai dengan kepentingan sektornya. Pada kasus yang lain bisa terjadi duplikasi sasaran atas program yang hampir sama. Melihat besarnya dana yang telah digunakan untuk penduduk miskin selama ini, muncul pertanyaan "sejauh mana efektifitas kebijakan penanggulangan kemiskinan itu?". Ringkasnya ada tiga isu kritis dari kebijakan penanggulangan kemiskinan: efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Sehubungan dengan pemikiran tentang al kemiskinan. Apakah memang merupakan atau perlu ada perlu kebijakan penanggul aspek. *Pertama*, alternatif mencari sumber-sumber penanggulangan ker anggaran pemerintah termasuk di dalam n implementasinya da didorong sebagai u bagi skema yang zakat, infak, shadaq dan sebagainya.

Dalam mengura menguatkan kelomp sangat serius, multidi dan aksi di berbagai masalah besar kemis penduduk berpend meningkatkan ket kemampuan keleml yang pro-poor dan

Sampai studi mengakomodasi ma untuk memperkuat Padahal dengan sa hampir miskin, pe hadapi ancaman ja non-pendapatan). I untuk membantu

³ Studi ini dilakukan pad tang *social capital* dan tra

Sehubungan dengan ketiga isu pokok tersebut maka muncul pemikiran tentang alternatif pengelolaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Apakah kebijakan yang selama ini dilakukan secara sektoral memang merupakan satu-satunya alternatif kebijakan yang sesuai? atau perlu ada perubahan pengelolaan. Pemikiran alternatif tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan setidaknya menyangkut dua aspek. *Pertama*, alternatif pembiayaan, menyangkut (1) bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif agar dana program penanggulangan kemiskinan tidak menjadi beban berkelanjutan bagi anggaran pemerintah; dan (2) bagaimana pengelolaan dana yang ada termasuk di dalam menentukan prioritas program. *Kedua*, bagaimana implementasinya dapat mencapai sasaran. Mungkinkah pendanaan didorong sebagai upaya penggalan dana masyarakat melalui berbagai skema yang selama ini berkembang seperti pengumpulan zakat, infak, shadaqoh, wakaf tunai, pengumpulan dana peduli sosial dan sebagainya.

Dalam mengurai prioritas pengurangan penduduk miskin dan menguatkan kelompok *transient poor* pesisir perlu pemikiran yang sangat serius, multidisiplin, dan kompleks. Yang jelas, kebijakan publik dan aksi di berbagai bidang sangat diperlukan untuk menyelesaikan 3 masalah besar kemiskinan dan *transient poor* yaitu: menurunkan jumlah penduduk berpendapatan rendah melalui pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kebisaan (*capability*) masyarakat; meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk membuat kebijakan publik dan aksi yang pro-poor dan *transient poor*.

Sampai studi ini selesai dilakukan³, pelayanan sosial belum mengakomodasi masyarakat hampir miskin, dan sasaran pengeluaran untuk memperkuat masyarakat hampir miskin juga masih diabaikan. Padahal dengan sasaran pengeluaran yang efektif untuk masyarakat hampir miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi ancaman jatuh miskin (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). *Pertama*, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari

³ Studi ini dilakukan pada tahun 2009; sebelumnya pernah dilakukan beberapa penelitian tentang *social capital* dan *transient poverty* antara tahun 2003 – 2007.

segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial yang memungkinkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. *Kedua*, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dalam konteks *transient poverty*. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat rentan miskin sangatlah menentukan.

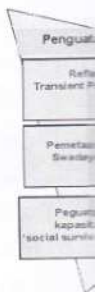
Studi ini mencatat bahwa akses terhadap infrastruktur dan jalan terbukti memiliki kaitan yang sangat erat dengan kemiskinan. Kondisi jalan yang buruk telah mengakibatkan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi, baik untuk perkotaan dan perdesaan. Sebagian besar masyarakat hampir miskin di empat lokasi riset, yang sangat tergantung pada angkutan umum, menyebutkan bahwa mereka harus mengeluarkan ongkos lebih besar untuk jarak tempuh yang pendek, karena kondisi jalan yang buruk. Fakta ini mempunyai argumen bahwa masyarakat *transient poor* bergantung pada infrastruktur, dan karena skala ekonominya sangat kecil maka respon terhadap kenaikan BBM atau kerusakan jalan menjadi signifikan. Kerentanan daya beli, menyebabkan mekanisme hutang menjadi tumbuh subur. Orientasi kelompok miskin meminjam uang justru ditujukan kepada keluarga-keluarga yang masuk dalam kelompok *transient poor* bukan kepada orang-orang kaya. Hal ini disebabkan karena kedekatan hubungan keluarga miskin pada keluarga-keluarga hampir miskin karena kondisi yang hampir sama. Sementara, orientasi keluarga kelompok *transient poor* dalam berhutang lebih didominasi dilakukan antar mereka. Jika tidak terlalu terpaksa, masyarakat miskin dan hampir miskin menghindari pinjam ke keluarga mampu yang biasanya juga berprofesi sebagai toke.

Merespon Fenomena *Transient Poverty*

Desain studi ini adalah merancang sebuah model penguatan masyarakat *transient poor*. Model ini memang baru dalam taraf awal desain yang mengkombinasikan antara fakta dan teori, belum diuji cobakan. Dalam desain model tersebut tampak penguatan kelompok *transient poverty* (TP) harus diperkuat oleh keberdayaan sosial, keberdayaan ekonomi, dan dukungan kebijakan publik penanggulangan kemis-

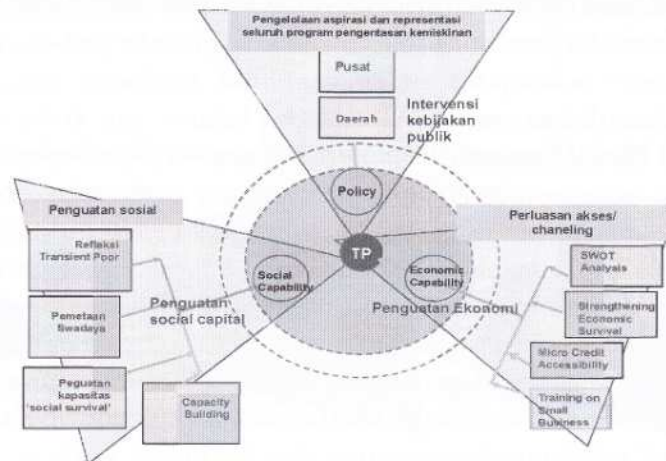
kinan. Pada taraf masyarakat *tran* dayaan, penguatan *social capital* dapat pertama menekankan sedangkan kelompok (*traits*) yang terlibat dalam sebagian menekankan pada kepemilikan ini nilai, dan saling *cial capital* akar jaringan hubungan hubungan kerja sama yang sinekan banyak masyarakat pertama diwarnai *social capital* sebagai. Secara teoritis hen dan Prusak

Me



kinan. Pada tahap awal, perlu dilakukan penguatan *social capital* masyarakat *transient poor* melalui proses refleksi, pemetaan keswadayaan, penguatan kapasitas survival, dan *capacity building*. Konsep *social capital* dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social networks*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik (*traits*) yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Pandangan kelompok pertama menekankan pada aspek jaringan hubungan sosial yang diikat oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, kesamaan nilai, dan saling mendukung. Menurut pandangan kelompok ini *social capital* akan semakin kuat apabila sebuah komunitas memiliki jaringan hubungan kerja sama, baik secara internal komunitas, atau hubungan kerja sama yang bersifat antar komunitas. Jaringan kerja sama yang sinergistik yang merupakan *social capital* akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bersama. Pendapat kelompok pertama diwarnai oleh teori-teori dinamika kelompok yang melihat *social capital* sebagai suatu kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi. Secara teoritis argumen tersebut didukung oleh Ancok (2003), Cohen dan Prusak (2001).

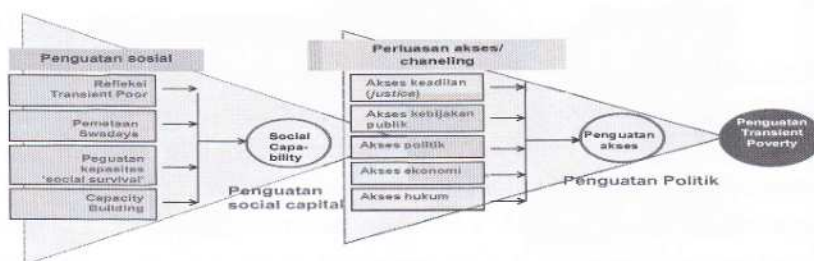
Gambar 5
Model Penguatan Kelompok *Transient Poor*



Pendapat kelompok kedua diwakili oleh kelompok teori kepribadian (*traits theorist*) yang melihat bahwa suatu kelompok kerja yang kohesif baru akan terjadi kalau individu memiliki sifat kepribadian tertentu yang mendukung interaksi sosial (Ancok 2003; Fukuyama, 1995 dan 2000). Dapat dijelaskan bahwa Fukuyama (1995) mendefinisikan *social capital* sebagai kemampuan individu dalam komunitas bekerjasama untuk tujuan bersama. Dengan bahasa yang lain, ia juga menjelaskan bahwa *social capital* sebagai seperangkat nilai-nilai dan norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota komunitas yang memungkinkan terjalannya kerja sama di antara mereka. Sejalan dengan pendapat Fukuyama, Bowles & Gintis (dalam Fukuyama 2000) mendefinisikan *social capital* sebagai suatu sifat (*traits*) yang melekat (*embedded*) pada diri individu yang berupa tata nilai kehidupan dan aturan yang dianut dan dijalankan oleh individu yang memfasilitasi kerja sama yang baik dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dengan memakai model di atas (Gambar 5), kebijakan intervensi yang bisa dirancang untuk penguatan kelompok *transient poor* pesisir seharusnya diawali dengan penggalian *social capital* masyarakat, yang secara bertahap menuju pemampuan/penguatan politik. Tanpa memaksimalkan potensi kelompok *transient poor* ini rasanya akan sangat lama menanggulangi kemiskinan pada kelompok miskin kronis. Setidaknya studi ini juga memikirkan bagaimana skema tahapan intervensi pada penguatan kelompok *transient poor*, yang digambarkan sebagai berikut (Gambar 6):

Gambar 6
Draft Model Penguatan Kelompok *Transient Poor* Perkotaan



Hubungan saling jujur, dengan kejujuran paham egaliter seseorang bermurah hati. Hubungan jaringan sosial menyederetara, yang dengan mendorong tumbuhnya kerja sama, yang dapat melahirkan keadilan jaringan sosial akan nilai-nilai yang diatur aturan-aturan yang berlaku yang apabila dilaksanakannya hubungan saling penguatan *social capital* masyarakat akan nilai individual mau akan tumbuh. Rasa kekuatan individu akan jika mengalami kesempitan posisi *transient*.

Tahap selanjutnya adalah pemberdayaan yang dikembangkan yaitu membangun kapasitas *channeling* akan mendorong terjadinya dengan pihak lain (baik mempertahankan terus dikembangkan). Kemitraan ini hanya lah pihak yang membangun *social capital* kelompok sudah mau bekerjasama untuk bisa melakukan kerja diperkuat, dapat se

Hubungan saling percaya bisa tumbuh apabila orang berlaku jujur, dengan kejujuran akan tumbuh pula sikap fair, dan dengan paham egaliter seseorang akan toleran, karena itu ia akan lebih mudah bermurah hati. Hubungan saling percaya juga akan tumbuh jika jaringan sosial menyediakan ruang bagi warganya untuk berpartisipasi setara, yang dengan itu akan bekerja prinsip resiprositas, dan akan mendorong tumbuhnya solidaritas antar warga, selanjutnya terjadilah kerja sama, yang dengan adanya institusi dan saling percaya akan melahirkan keadilan. Hubungan-hubungan antar orang di dalam jaringan sosial akan berlangsung baik apabila mereka memiliki nilai-nilai yang dianut bersama, norma-norma, sanksi-sanksi, serta aturan-aturan yang disepakati bersama yang menjadi acuan tindak, yang apabila dilaksanakan dengan tegas dan adil akan melahirkan hubungan saling percaya. Dengan dikembangkannya kembali *social capital* masyarakat *transient poor* pesisir baik dalam kerangka nilai-nilai individual maupun nilai-nilai kelompok, maka rasa kebersamaan akan tumbuh. Rasa kebersamaan inilah sesungguhnya yang menjadi kekuatan individu kelompok *transient poor* untuk saling membantu jika mengalami kesulitan sehingga mereka tetap bisa *survive* pada posisi *transient*.

Tahap selanjutnya, dari pemberdayaan kelompok *transient poor* adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dalam model yang dikembangkan lebih diarahkan pada aktivitas *channeling*, yaitu membangun kemitraan beraktivitas ekonomi bersama. Aktivitas *channeling* adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terjadinya kemitraan antara masyarakat *transient poor* dengan pihak lain (swasta/ pemerintah/ lembaga peduli) dalam rangka mempertahankan kemampuan *survival* ekonomi mereka dan akan terus dikembangkan sampai kelompok tersebut mapan ekonomi. Kemitraan ini hanya bisa terjadi jika ada keseimbangan kedua belah pihak yang bermitra. Kelompok masyarakat *transient poor* dengan *social capital* yang dimilikinya, baik secara individu maupun kelompok sudah memiliki kemampuan keberdayaan dan kemampuan bekerjasama untuk bisa mengakses berbagai sumber daya. Untuk bisa melakukan kerja sama kemitraan, maka individu-individu harus diperkuat, dapat secara individu ataupun bergabung dalam kelompok-

kelompok. Dengan individu ataupun kelompok yang kuat maka kemitraan akan dapat dibangun. Di sisi lain, pihak-pihak peduli baik lembaga pemerintah, swasta, maupun perseorangan, bersedia membuka peluang yang seluas-luasnya dan secara aktif mengajak kepada masyarakat *transient poor* untuk dapat mengakses sumber daya, yang mereka miliki dan bekerjasama membangun kemampuan perekonomian masyarakat *transient poor*.

PENUTUP

Studi ini memberi kontribusi informasi tentang sebagian kelompok *transient poor* di pesisir Bengkulu. Potret tentang kondisi mereka tergambar sebagian. Tentu masih banyak yang perlu dilacak guna menggambarkan secara kompresensif siapa kelompok *transient poor* itu. Studi ini juga menunjukkan bahwa kelompok ini adalah kelompok potensial untuk terlibat dalam upaya menanggulangi kemiskinan kelompok *chronic poor*, sebab "lokasi kewilayahan hidup" mereka sangat berdekatan dan memiliki potensi *social capital*.

Model penguatan yang ditawarkan setelah melakukan studi sangat bergantung pada kepedulian, komitmen, dan keseriusan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kebijakan publiknya untuk memberi perhatian lebih pada kelompok *transient poor*. Perhatian pada kelompok *transient poor* harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya kelompok masyarakat miskin, keberadaan kelompok *transient poor* juga merupakan tanggung jawab pemerintah.

Meskipun disadari kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan *transient poor* sangat terbatas, diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran strategis pemerintah harus dilakukan dalam batas-batas, dimana kebijakan publik yang sedang dan yang akan dijalankan benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi penduduk miskin, dan lebih khusus lagi bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga *transient poor*. Pemerintah dapat mengopti-

malkan kinerja instansi kebijakan penanggulangan juga dapat mengajaga persoalan *transient poor*

KEPUSTAKAAN

- Ancok, Djamaludin
Naskah pidato
Psikologi U
- Badan Perencanaan
Poverty di I
Vol.3 – No.
- Badan Pusat Statistik
tember.
- Bank Dunia. 2006a.
vember 200
- Bank Dunia 2006. S
Dalam Kom
- Bhata, Saurav Dev
minants an
in Nepal".
Paper 66, U
- Biro Pusat Statistik
sial-Ekonomi
- Cawthorne, Alexa
[program.o](#)
- Chomitz. 2007. Ex
Tropical Fo
- Cohen, Don, and I
capital mak

malkan kinerja instansi sektoralnya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan penanganan *transient poor*. Di samping itu, pemerintah juga dapat mengajak seluruh elemen bangsa dalam menyelesaikan persoalan *transient poor*.

KEPUSTAKAAN

- Ancok, Djamaludin. 2003. *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Naskah pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas Psikologi UGM.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2006. "Potensi Transient Poverty di Indonesia Tahun 2005". *Majalah Info Kajian Bappenas* Vol.3 - No.1 Oktober, hlm. 26-31.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Berita Resmi Statistik*, No. 47 / IX / 1 September.
- Bank Dunia. 2006a. *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. November 2006.
- Bank Dunia 2006. Separuh Penduduk Masih Rentan Menjadi Miskin. Dalam *Kompas Online*, 8 Desember.
- Bhata, Saurav Dev., and Suman Kumari Sharma. 2006. "The Determinants and Consequences of Chronic and Transient Poverty in Nepal". Chronic Poverty Research Centre (CPRC) *Working Paper* 66, UK.
- Biro Pusat Statistik. 2008. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*.
- Cawthorne, Alexandra. 2008. *Women and Poverty*. www.american-program.org
- Chomitz. 2007. *Expansion, Poverty Reduction, and Environment in the Tropical Forests*. Jakarta: CIFOR.
- Cohen, Don, and Laurence Prusak. 2001. *In good company: How social capital makes organizations work*. New York: Free Press.

- Destama, Freni. 2004. *Peran Perempuan Dalam Upaya Pelestarian Hutan Lindung di Sekitar Kawasan Bukit Gedang Hulu Lais*. Skripsi Program Studi Budi Daya Hutan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York: Free Press.
- . 2000. *The great disruption: Human nature and the reconstitution of social order*. London: Profile Books.
- Gibson, J. 2001. 'Measuring Chronic Poverty Without a Panel'. *Journal of Development Economics* 65, 243-266.
- Harmadi, Sonny Harry B. 2007. Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Warta DEMOGRAFI (Wahana Memasyarakatkan Pemikiran Demografi)*, Vol 37, No 3.
- Human Development Report Indonesia (2004).
- Hutahaean, Marlan. 2006. "Penataan Kelembagaan, Perubahan Paradigma Dan Pilihan Kebijakan Sebagai Langkah Strategis Menanggulangi Kemiskinan: Perspektif Administrasi Publik". *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi*, Vol. 10, No 1.
- INSTRAW. *Women and Poverty, New Challenge, Beijing at 10, Putting Policy into Practice*. www.uninstraw.org
- Jalan, Ivotsna and Martin Ravallion. 1998. *Determinants of Transient and Chronic Poverty: Evidence from Rural China*. The World Bank Research Development Group.
- Karnesih, Erlis. 2005. "Pengentasan Penduduk Miskin Sebagai Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Barat". *Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (Journal Of Social And Humanities)*, Vol 7, No 3 (2005).
- Kurosaki, Takashi. 2005. *The Measurement of Transient Poverty: Theory and Application to Pakistan*. Paper presented at the CPRC Conference, UK, 2005.
- Ma'ruf, Ahmad. 2006. www.kapanlagi.com
- Mochtar. 2001. *Strategi Pengembangan Hutan Lindung Dalam Penanaman dan Pemertanian P2K*. Pengembang.
- Muyanga, Milu, Milt. *Chronic Rural Poverty: A Revised Working Program of I*
- Panimbang. 2007. [Stbang.blogspot.com/2007/08/08-08-2007-panimbang-nan-di.html](http://stbang.blogspot.com/2007/08/08-08-2007-panimbang-nan-di.html)
- Peilouw, Lusia. 2007. *Community Development in Indonesia*, Vol.
- Rahayu, Sri. 2004. *Pelestarian Hutan (HKM) dan Pengembangan Studi*. Fakultas Pertanian, U
- Sari, Laura Kartika. *Sub DAS Basrah Hutan, Jurusan Kehutanan, Universitas Bengkulu*.
- Santoso, Djonet, T. *Konsep Otonomi Daerah dan Model Partisipasi Masyarakat yang Menjaga Hutan*. Lap Depdiknas
- Santoso, Djonet dan Mochtar. *Karakteristik Hutan Lindung (Studi Pada Kawasan Hutan Lindung Bengkulu)*. Dikti Depdiknas

- Mochtar. 2001. Strategi Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal Dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan (Kasus Implementasi P2KP di Desa Sukadanau, Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial).
- Muyanga, Milu, Milton Ayieko, and Mary Bundi. 2007. "Transient and Chronic Rural Household Poverty: Evidence from Kenya". *Revised Working Paper*. The Poverty and Economic Policy (PEP) program of IDRC.
- Panimbang. 2007. Strategi Penghapusan Kemiskinan. <http://panimbang.blogspot.com/2007/7/strategi-penghapusan-kemiskinan-di.html-ftnl>
- Peilouw, Lusia. 2007. "Infant Mortality In Nuaulu And Non-Nuaulu Communities In Maluku Tengah: Social Exclusion And Ethnicity In Indonesia". ISSN 1907-2902: *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Rahayu, Sri. 2004. *Peran Perempuan Dalam Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun*. Skripsi Program Studi Budi Daya Hutan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu.
- Sari, Laura Kartika. 2004. *Analisis Gender Dalam Pemanfaatan SDA di Sub DAS Batang Tabir Jambi*. Skripsi Program Studi Budi Daya Hutan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu.
- Santoso, Djonet, Titiek Kartika Hendrastiti. 2005. *Menyandingkan konsep otonomi daerah dengan goodecological governance: Mencari model partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung yang menjamin sinergi usaha pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing XI Ditjen Dikti Depdiknas. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
- Santoso, Djonet dan Titiek Kartika Hendrastiti. 2006. *Analisis Sosial Karakteristik Dan Peta Konflik Masyarakat Nelayan Tradisional (Studi Pada Dua Komunitas Nelayan Tradisional Di Propinsi Bengkulu)*. Laporan Penelitian Fundamental didanai oleh Dikti Depdiknas.

- Santoso, Djonet dan Titiek Kartika Hendrastiti. 2007. *Rekonstruksi Social Capital: Model Pengembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional Di Bengkulu*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing didanai oleh Dikti Depdiknas.
- Smith, Noel and Sue Middleton. 2007. *A Review of Poverty Dynamics Research in the UK*. The Centre for Research in Social Policy. UK: The Joseph Rowntree Foundation
- Suselo. 2008. Dalam *Kompas* 30 Oktober 2008
- United Nation Development Program. 2007. *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UNFPA. 2007. *Women and Poverty*. www.UNFPA.org

Prospek Ekspor Indonesia di P

Fajar B. Hirawan

Sektor pertambangan sebagian orang akan lebih ditekankan yang dimulai sejak yang dulu pernah Indonesia. Saat ini pada sub sektor diprediksi akan ekonomi Indonesia dengan terus maju dunia serta iklim minyak kelapa diharapkan man

PENGANTAR

Kelapa sawit sedang naik daun permintaan global akan kelapa sawit yang tinggi akan tetapi juga (CPO). Alasan utamanya sangat menjanjikan